
Implementasi dan Dampak Pengarusutamaan Gender di Arab Saudi Pada Tahun 2016-2022

Shenndy Fadilah Nurul Aini¹⁾, I Made Anom Wiranata²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait implementasi dan dampak dari pengarusutamaan gender di Arab Saudi pada tahun 2016-2022 pasca lahirnya Visi Arab Saudi 2030. Dalam tulisan ini menggunakan konsep pengarusutamaan gender dan teori difusi norma. Konsep pengarusutamaan gender digunakan untuk melihat implementasi pengarusutamaan gender melalui kebijakan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan gender di Arab Saudi dan melalui implementasi tersebut akan dilihat hasil yang diberikan pada berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan politik. Difusi norma sebagai teori penunjang yang menguatkan konsep pengarusutamaan gender dalam menjabarkan implementasi dan dampak dari pengarusutamaan gender di Arab Saudi. Hasil yang didapatkan ialah pengarusutamaan gender memberikan dampak positif dan negatif dalam berbagai bidang.

Kata-kunci : Arab Saudi, Pengarusutamaan Gender, Visi Arab Saudi 2030

Abstract

This research explains the implementation and impact of gender mainstreaming in Saudi Arabia in 2016-2022 after the birth of the Saudi Arabian Vision 2030. This paper uses the concept of gender mainstreaming and norm diffusion theory. The concept of gender mainstreaming is used to see the implementation of gender mainstreaming through gender responsive policies to overcome the gender gap in Saudi Arabia and through this implementation the results will be seen in various fields such as economics, social culture and politics. Norm diffusion as a supporting theory that strengthens the concept of gender mainstreaming in explaining the implementation and impact of gender mainstreaming in Saudi Arabia. The results obtained are that gender mainstreaming has positive and negative impacts in various fields.

Keywords : Gender Mainstreaming, Saudi Arabia, Saudi Vision 2030

Kontak Penulis

Shenndy Fadilah Nurul Aini
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Jl. Jend. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234
Telp: 62881037149415
E-mail : shndyfna@gmail.com

.PENDAHULUAN

Banyak negara-negara konservatif yang mulai membuka diri untuk memberikan kebebasan bagi warga negaranya. Arab Saudi merupakan salah satu contoh negara yang menarik perhatian dunia atas tindakan berani mereka dalam membuka ruang kebebasan bagi negaranya. Negara tersebut sebelumnya dikenal sebagai negara Islam ultra-konservatif yang kini bergerak menjadi negara Islam yang lebih moderat. Dahulu, sebagai negara yang konservatif maka seringkali kebijakan yang dibuat terasa cukup mengekang terutama bagi perempuan. Hal tersebut terjadi karena adanya sistem perwalian yang mengakibatkan terciptanya relasi kuasa yang menempatkan laki-laki lebih superior daripada perempuan.

Perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi saat ini ditandai dengan kelahiran suatu visi yang menjadi titik awal reformasi besar-besaran di negara tersebut. Visi ini dinamai dengan Visi Arab Saudi 2030. Visi Arab Saudi 2030 berisikan banyak target diversifikasi ekonomi dan juga reformasi di dalamnya. Kemudian yang menjadi menarik ialah dalam visi ini Arab Saudi mulai memperhatikan kepentingan perempuan. Visi Arab Saudi 2030 dicetuskan pada tahun 2016 yang menandai langkah awal upaya pengarusutamaan gender di Arab Saudi karena melalui visi ini banyak terlahir aturan-aturan baru yang mampu memberikan jaminan pada hak-hak kebebasan bagi perempuan.

Terdapat 3 literatur yang digunakan sebagai rujukan yakni yang pertama—*“Pengarusutamaan Gender di Jepang untuk Mencapai SDG’s (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal”* oleh Intan Dwi Masrullah (2020). Tulisan ini menguji pengimplementasian strategi pengarusutamaan gender di Jepang yang diadopsi melalui perspektif Feminisme Liberal. konsep. Tulisan

ini membantu penulis memahami lebih dalam mengenai konsep dari pengarusutamaan gender. Namun masih memerlukan rujukan lain karena latar belakang negara Arab Saudi berbeda dengan Jepang.

Tulisan kedua ialah *“Gender Equality in a Time of Change: Gender Mainstreaming After Egypt’s Arab Spring”* oleh Farah Gamal Shash dan Carie L. Forden (2016). Tulisan kedua ini membahas mengenai implementasi pengarusutamaan gender di Mesir pasca Arab Spring. Mesir dan Arab Saudi memiliki latar belakang yang mirip. Namun karena tulisan ini tidak menggambarkan fenomena spesifik di Arab Saudi maka penulis merujuk tulisan selanjutnya.

Tulisan terakhir ialah *“Economic Reforms and Women’s Empowerment in Saudi Arabia”* oleh Aylin Topal (2019) yang telah spesifik membahas mengenai fenomena gender di Arab Saudi. Tulisan terakhir ini menjelaskan mengenai reformasi struktural pro perempuan di Arab Saudi melalui Visi Arab Saudi 2030. Tulisan ini membahas mengenai fenomena baru di Arab Saudi terkait pemberdayaan perempuan. Namun tulisan ini hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan dan belum diintegrasikan ke dalam aturan atau kebijakan.

Dari latar belakang permasalahan dan beberapa rujukan di atas, tulisan ini dibuat untuk mengetahui dampak dari pengimplementasian pengarusutamaan gender di Arab Saudi pada tahun 2016-2022 saat tulisan ini dibuat.

METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan langsung dari dokumen dan website resmi Arab Saudi dan sumber sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan

Teknik *coding* juga digunakan untuk memudahkan penulis dalam mengolah data. Adapun dalam tulisan ini penulis menggunakan konsep pengarusutamaan gender sebagai konsep dasar dalam menganalisis fenomena yang terjadi di Arab Saudi terkait implementasi dan dampak yang dihasilkan di Arab Saudi. Kemudian penulis juga menggunakan teori difusi norma untuk menguatkan konsep pengarusutamaan gender dalam melihat implementasi dan dampak dari pengarusutamaan gender yang terjadi di Arab Saudi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Kondisi Ketidaksetaraan Gender di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara monarki absolut yang mengadopsi hukum syariah sebagai hukum yang berlaku. Sebelum Kerajaan Arab Saudi ini terbentuk sebelumnya negara ini merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Namun kemudian muncul tokoh-tokoh yang berupaya menaklukkan wilayah dengan cara menggaet ulama dan mengadopsi wahabisme atau pemurnian islam demi keuntungan politik dan ekonomi. Wahabisme memungkinkan terciptanya solidaritas dan konsolidasi berbagai suku yang sulit dikontrol. Atas konsolidasi tersebut maka kerajaan Arab Saudi berhasil didirikan oleh Abdul Aziz Al-Saud pada tahun 1932.

Paham Wahabisme yang diadopsi oleh pendahulu Arab Saudi merupakan paham yang mengajak kembali pada pemurnian Al-quran dan Hadits. Namun dalam memahami keduanya, ajaran wahabi justru menafsirkannya secara harfiah dan kaku. Paham wahabisme kemudian memperkuat budaya dan adat istiadat yang menindas perempuan dan menciptakan relasi kuasa yang menempatkan posisi laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan sehingga norma-

norma lokal menjadi terstruktur menempatkan perempuan pada posisi yang kurang diuntungkan serta merampas hak-hak mereka. Lalu patriarki juga semakin membudaya dan peran perempuan didikte hanya pada peran esensial mereka dalam lingkup domestik.

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan, Arab Saudi kemudian berkembang menjadi negara yang sangat konservatif dengan memadukan agama dan budaya sebagai pedoman hidup mereka. Budaya homogen yang terdapat di Arab Saudi membuat masyarakatnya sulit untuk membedakan antara prinsip agama dengan budaya mereka, Kesulitan tersebut yang kemudian membentuk anggapan bahwa diskriminasi perempuan merupakan bagian dari ajaran agama mereka padahal hal tersebut seringkali tercampur aduk dan tercipta dari stereotip mereka sendiri.

Sistem perwalian di Arab Saudi paling dominan menunjukkan relasi kuasa antar gender di negara tersebut. Bahkan sistem perwalian ini merupakan dalang dari kesenjangan gender yang terjadi di Arab Saudi. Perempuan tidak dapat melakukan apa yang dikehendakinya tanpa persetujuan wali mereka. Wali disini ialah laki-laki yang menjadi mahram perempuan seperti Ayah yang kemudian apabila perempuan tersebut sudah menikah maka wali mereka akan berganti menjadi suami. Hal tersebut kemudian merambat pada perempuan yang tidak dapat bebas dalam menentukan kehidupan mereka. Perilaku tidak adil tersebut diterapkan dalam lini kehidupan seperti ekonomi dan rumah tangga (Gorman, 2006 dalam Mufiedah, 2020).

Penerapan Pengarusutamaan Gender di Arab Saudi

Konsep *gender mainstreaming* lahir sebagai turunan dari norma kesetaraan gender yang berupaya disebarluaskan. Sesuai dengan identifikasi Caroline Moser (2005) berkata

bahwa *Gender Mainstreaming* dibagi menjadi beberapa tahapan yakni pengadopsian terminologi kesetaraan gender, penerapan kebijakan *gender mainstreaming*, dan implementasi pengarusutamaan gender. Pengadopsian terminologi kesetaraan gender dapat dilihat dari proses penginisiasian norma kesetaraan gender yang disebarkan melalui organisasi internasional PBB. Terbentuknya CEDAW atau *The Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979 sebagai upaya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW kemudian menjadi penting dikarenakan berupaya memperjuangkan persamaan hak bagi laki-laki maupun perempuan dalam satu instrument (Dewi, 2022).

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang meratifikasi CEDAW tersebut pada tahun 2000. Dengan diratifikasinya CEDAW di Arab Saudi maka menjadi langkah awal Arab Saudi dalam mengadopsi terminologi kesetaraan gender. Pada era kepemimpinan Raja Salman yakni tahun 2015 pasca wafatnya Raja Abdullah. Raja Salman mengangkat putranya yakni Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota. Kemudian Visi Arab Saudi 2030 dicetuskan oleh Muhammad bin Salman pada tanggal 25 April 2016 yang menandai kelahiran reformasi pembangunan ekonomi di Arab Saudi.

Adanya Visi Arab Saudi 2030 ini maka menjadi suatu terobosan baru yang berupaya untuk memodernisasikan negara konservatif tersebut dengan cara mengadopsi poin-poin dari SDGs. Terdapat 3 pilar utama yang menjadi arah pelaksanaan Visi Arab Saudi 2030. Pilar pertama yakni *A Vibrant Society* atau yang dimaksudkan dengan menjadi masyarakat yang dinamis. Arab Saudi melihat bahwa negaranya memiliki peluang besar yang dipadukan dengan sumber daya alam yang

melimpah namun mereka percaya bahwa kekayaan sesungguhnya terletak pada orang-orang dan masyarakat itu sendiri. Pada pilar ini kesetaraan gender ditunjukkan dengan diberikannya kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, olahraga dan hiburan sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup mereka (Saudi Arabia Vision 2030, 2016).

Pilar selanjutnya ialah *Thriving Economy* atau yang mudah dipahami sebagai agenda pengembangan ekonomi. Pilar ini merupakan pilar utama yang ditujukan pada Visi Arab Saudi 2030 yang ingin lepas dari ketergantungannya terhadap minyak bumi. Negara ini memiliki tujuan ambisius untuk meningkatkan perekonomiannya secara besar-besaran dari berbagai macam aspek salah satunya ialah memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan dalam Visi tersebut menargetkan peningkatan partisipasi pekerja perempuan dari 22% menjadi 30%.

Pilar terakhir ialah *An Ambitious Nation* atau ambisi nasional negara Arab Saudi. Dalam pilar ini negara Arab Saudi berupaya untuk mengatur peran dan kebutuhan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara efektif.

Visi Arab Saudi 2030 juga menjadi penanda penerapan pengarusutamaan gender di Arab Saudi karena pada visi tersebut berisikan kebijakan Arab Saudi yang menginginkan perempuan turut berpartisipasi dan mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Visi Arab Saudi ini juga yang mendasari kelahiran berbagai macam aturan-aturan baru yang telah mengarusutamakan kepentingan gender.

Implementasi Pengarusutamaan Gender di Arab Saudi

Teori difusi norma dan konsep pengarusutamaan gender menjadi pisau analisis yang digunakan untuk menjelaskan fenomena pengarusutamaan gender di Arab Saudi. Kedua pisau analisis tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Dalam menjelaskan pembentukan kebijakan pengarusutamaan gender sehingga dapat diimplementasikan pada masyarakat dan menjadi bagian dari norma kesetaraan gender maka dapat dilihat prosesnya melalui teori difusi norma.

Menurut Sikkink dan Finnemore (1998) difusi norma terjadi melalui 3 tahapan. Tahapan pertama *Norm Entrepreneur* yakni penginisiasian munculnya norma. Hal ini ditandai dengan norma kesetaraan gender yang diinisiasikan melalui organisasi internasional yakni CEDAW yang berisikan upaya untuk menyudahi diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian *Norm Cascade* yaitu pengadopsian norma oleh suatu negara. Pada tahapan ini dicerminkan dari Arab Saudi yang telah meratifikasi CEDAW pada tahun 2000. Dan terakhir *Norm Internalization* yakni internalisasi suatu norma ke dalam undang-undang domestik dan menjadi standar berperilaku. Tahapan ini merupakan yang terpenting untuk melihat upaya Arab Saudi berkomitmen dalam ratifikasi CEDAW dengan membuat serangkaian kebijakan yang mengarusutamakan gender.

Tahapan internalisasi norma menjadi penting dalam penyebaran norma kesetaraan gender yakni tahapan ini terdapat tahapan penerapan pengarusutamaan gender dan implementasi pengarusutamaan gender.

Di dalam implementasi pengarusutamaan gender perlu pemahaman yang baik terkait strategi yang tepat dalam tiap-tiap bidang demi

mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan hak-hak perempuan. Implementasi pengarusutamaan gender berfokus pada kebijakan-kebijakan yang mengintegrasikan kepentingan berbagai gender, karna kebijakan yang responsif gender juga menjadi sangat penting untuk melihat dampak yang dihasilkan.

Bidang Ekonomi

Pengarusutamaan gender juga menjadi relevan dalam tiap bidang. Adapun implementasinya di Arab Saudi penulis jabarkan dalam tiga bidang yakni ekonomi, sosial budaya, dan politik. Bidang pertama yakni bidang ekonomi. Ekonomi merupakan sektor yang menjadi fokus utama dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Arab Saudi. Pada bidang ini telah dibuat serangkaian kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ini sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Perempuan dalam Pelatihan dan Tempat Kerja

Kementerian Pendidikan Arab Saudi telah mengarusutamakan kepentingan gender dengan cara menyediakan program pemberdayaan dan pengembangan demi meningkatkan ketenagakerjaan perempuan di dalam bidang pendidikan. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas dan juga praktik guru perempuan dalam pendidikan. Program ini dilakukan dengan cara mengadakan serangkaian acara, seminar, dan juga lokakarya bagi seluruh guru perempuan yang berada di Arab Saudi.

2. Hukum Ketenagakerjaan Perempuan

Selain menyediakan program pengembangan dan pemberdayaan bagi perempuan, pemerintah Arab Saudi juga menjamin hukum yang berlaku terkait hak-hak perempuan dalam ketenagakerjaan. Jaminan ini tercantum pada

Bab IX mengenai Hukum Ketenagakerjaan Arab Saudi yang tertera dari pasal 149-160. Dalam pasal-pasal tersebut berisikan mengenai hak-hak yang didapatkan oleh pekerja perempuan seperti hal-hal mengenai waktu kerja, ketentuan cuti hamil/melahirkan, fasilitas kerja, dan upah. Selain itu, dalam pasal-pasal tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban majikan untuk memfasilitasi hak-hak yang wajib diterima oleh pekerja perempuan.

3. Pemberdayaan Pekerja Perempuan

Demi meningkatkan persentase perempuan yang bekerja dan juga keterampilannya dalam bekerja pemerintah Arab Saudi membentuk beberapa program yaitu *Qiyadyat*, *Tamheer*, *Wusool*, *Qurrah*, dan Pembiayaan Freelance. Adapun *Qiyadyat* ialah suatu platform interaktif yang memberikan fasilitas akses secara cepat pada pemimpin perempuan yang terdapat di sektor publik, swasta, dan lembaga masyarakat sipil. Diharapkan dengan adanya platform ini perempuan dapat saling berbagi motivasi dan pengalaman untuk mengembangkan karir mereka.

Selanjutnya ialah program *Tamheer*. Program ini merupakan pelatihan yang diberikan pada perempuan untuk mempersiapkan dan mengembangkan keterampilan tenaga kerja nasional dengan membekali perempuan dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pada pelatihan ini juga terdapat tes elektronik yang akan memberikan sertifikat apabila peserta mampu menyelesaikan pelatihan.

Kemudian program *Wusool* yang berafiliasi langsung bersama Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRDF). Program ini bertujuan memberikan pengurangan biaya transportasi bagi pekerja perempuan swasta di Arab Saudi. Program ini juga telah diatur dengan adil seperti ditetapkan bantuan sebesar SR 1.100 atau senilai dengan Rp 4,1 juta per

bulan bagi pekerja perempuan yang upah bulannya tidak lebih dari SR 6.000 atau senilai Rp 22 juta. Dan bagi pekerja perempuan yang upah bulannya mencapai lebih dari SR 6.001 (senilai Rp 22 juta) hingga SR 8.000 (senilai Rp 30 juta) maka potongan yang diberikan sebesar SR 800 atau senilai dengan Rp 3 juta (Republika, 2021).

Program selanjutnya ialah *Qurrah* yang berafiliasi dengan Human Resources Development Fund (HRDF) juga. HRDF sendiri membuat suatu platform yang dapat berfungsi untuk menjembatani komunikasi perempuan pekerja yang memiliki anak dengan lembaga penitipan anak berlisensi yang jasanya dapat mereka gunakan selama perempuan bekerja. Adapun bantuan dari HRDF pada tahun pertama maksimal SR800 dari biaya penitipan anak pertahun, kemudian SR600 untuk tahun kedua, lalu SR500 pada tahun, dan SR400 untuk tahun keempat.

Terakhir ialah Program Pembiayaan Freelance. program pembiayaan kepada freelance atau wirausaha untuk meningkatkan produktivitas, dan keterampilan. Pada program ini Bank Pembangunan Sosial Arab Saudi menyalurkan dana pinjaman bagi freelance dan wirausaha untuk mendorong dan meningkatkan kontribusi masyarakat pada perekonomian nasional negara.

Bidang Sosial Budaya

Dalam bidang ini terdapat banyak gebrakan baru pemerintah Arab Saudi yang menarik perhatian dunia. Gebrakan tersebut menjadi upaya transformative gender untuk mencapai kesetaraan gender. Adapun implementasi dalam bidang tersebut sebagai berikut:

1. Kesetaraan Pendidikan

Pada website resmi Saudi Arabia Gov dijelaskan bahwa pemerintah meluncurkan

suatu program pendidikan dan juga pelatihan yang mana semua gender baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dan setara dalam memperolehnya. Program ini didukung oleh undang-undang yang mengatur mengenai penyediaan pendidikan umum yang dapat diakses secara setara bagi semua gender. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya untuk memberdayakan perempuan yang ingin berkarir dalam bidang ini. Karna menurut Ananta (2015) perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan seperti stereotype, prasarana, akses, dan komitmen keluarga.

2. Perbaikan Sistem Kesehatan jasmani dan Rohani

Kementerian Kesehatan Arab Saudi telah prihatin dengan sistem kesehatan di Arab Saudi bagi perempuan, dengan demikian maka diluncurkanlah suatu program kesehatan dan imunisasi ibu dan anak dan juga informasi pendidikan yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kementerian Kesehatan memberikan perhatian khusus bagi para perempuan khususnya terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksual mereka. Pada tahun 2016 diperbolehkannya perempuan untuk berolahraga di pusat kebugaran. Pada tahun 2017 juga mulai ditetapkan bahwa perempuan yang telah berusia 18 tahun ke atas memiliki hak untuk menjalani perawatan di rumah sakit tanpa seizin wali mereka.

3. Kebebasan Perempuan

Pada tahun 2017 diumumkan pencabutan larangan mengemudi perempuan secara resmi yang dapat legal dilakukan pada bulan Juni 2018. Kemudian pada tahun 2018 juga diberlakukannya hukuman berat bagi pelaku pecehan di Arab Saudi. Pada tahun tersebut juga diperbolehkannya perempuan mengenakan pakaian apapun asalkan layak

dan terhormat. Kemudian pada tahun 2019 dilonggarkannya sistem perwalian di Arab Saudi. Kemudian pada tahun yang sama pula Arab Saudi membangun sarana prasarana umum yang setara bagi perempuan pula.

Bidang Politik

Bidang ini menjadi penting karena terdapat pengimplementasian kebijakan transformative gender. Adapun implementasinya sebagai berikut:

1. Perempuan dalam Dewan Syura

Dewan Syura merupakan lembaga legislatif tertinggi di Arab Saudi. Perempuan diberikan 30 kursi penting di dewan syura. Dengan duduknya perempuan di kursi pemerintahan sebagai pembuat kebijakan atau keputusan digunakan untuk mengajukan rekomendasi kebijakan yang mewakili perspektif perempuan juga.

2. Perempuan dalam Kepemimpinan

Arab Saudi mulai memberikan hak bagi kaum perempuan untuk menduduki jabatan yang tinggi pemerintahan dan juga perusahaan, baik itu negara maupun swasta.

3. Pelatihan Kepemimpinan

Program pelatihan kepemimpinan yang diluncurkan oleh Arab Saudi yang berbentuk suatu *platform* atau wadah yang memberikan fasilitas akses secara cepat pada pemimpin perempuan yang terdapat di sektor publik, swasta, dan lembaga masyarakat sipil.

Dampak Pengarusutamaan Gender di Arab Saudi

Berdasarkan *handbook* UN Women (2022) implementasi pengarusutamaan gender haruslah fokus pada upaya pencapaian kesetaraan gender yang menjadi hasil akhir tolak ukur penilaian dampaknya. Dampak

positif tentunya menjadi hasil yang paling ideal diinginkan oleh pembuat kebijakan, namun menjadi tidak realistis jika mengharapkan terjadi dalam waktu yang singkat karena pada prosesnya implementasi tersebut mengalami banyak hambatan dan tantangan terutama pada negara yang relasi kuasa antar gender masih kuat seperti Arab Saudi.

Mariam Daly (2005) mengatakan bahwa pengimplementasian pengarusutamaan gender secara simbolis sebagai kesetaraan gender modern turut memberikan dampak pada tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, apabila masyarakat dapat menerapkan pengarusutamaan gender yang telah diimplementasikan oleh pemerintah maka jalan Arab Saudi dalam mencapai kesetaraan gender semakin terbuka lebar. Pengimplementasian pengarusutamaan gender relevan dalam berbagai bidang dan memberikan dampak yang beragam pula.

Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi diidentifikasi bahwa pengimplementasian pengarusutamaan gender menghasilkan hasil yang positif sesuai dengan yang ditulis oleh UN Women (2023) bahwa pengarusutamaan gender yang diupayakan efektif mengatasi penyebab perempuan mengalami diskriminasi. Hal ini dibuktikan dengan dihapusnya pembatasan perempuan dalam memilih karir sehingga mereka dapat berpartisipasi menjadi tenaga kerja terampil di Arab Saudi sesuai dengan minat mereka. Hal tersebut menjadi pendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja di Arab Saudi. Hasil ini dibuktikan dengan data yang dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi yakni Ahmed Al-Rajhi bahwa pada tahun 2022 partisipasi tenaga kerja perempuan mencapai angka 37 persen (Al-Arabiya News, 2023).

Berdasarkan laporan *Women, Business, and The Law* oleh World Bank pemberdayaan perempuan di Arab Saudi juga mengalami peningkatan yang signifikan yang mana pada tahun 2019 Arab Saudi menduduki posisi terbawah dengan skor poin 25,63 yang kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan hingga pada tahun 2022 Arab Saudi mencapai skor WBL sebesar 80 (WBL World Bank). Selain itu berdasarkan hasil terbaru dari laporan *Global Gender Gap Report 2022* oleh World Economic Forum (WEF) Arab Saudi menempati posisi 127 dari 146 negara yang mana sebelumnya pada tahun 2016 Arab Saudi menempati posisi 141 dari 144 negara. Hasil positif tersebut memperlihatkan bahwa Arab Saudi secara perlahan mampu meningkatkan kesetaraan gender di negaranya dengan memberikan hak-hak bagi perempuan yang didukung dengan kebijakan-kebijakan pro gender.

Turut berpartisipasinya perempuan telah menjadi potensi besar yang membawa keberhasilan pembangunan berkelanjutan terutama pada bidang ekonomi bagi suatu negara. Hal ini dapat dilihat bahwa kontribusi perempuan dalam pasar tenaga kerja Arab Saudi memberikan hasil yang positif seperti kenaikan PDB sebesar 5,5 persen pada kuartal keempat tahun 2022 (Arab News, 2023). Data-data yang telah disebutkan menunjukkan keberhasilan Visi Arab Saudi 2030 yang mengharapkan hasil positif bagi perekonomian Arab Saudi salah satunya didorong oleh peran perempuan di dalamnya.

Bidang Sosial Budaya

Dalam bidang sosial budaya, pengarusutamaan gender juga berupaya untuk mencapai hasil atau dampak yang ideal yakni “kesetaraan gender”. Pada pengarusutamaan gender di bidang ini upaya perubahan transformatif gender masih belum diterima dengan baik oleh

masyarakat Arab Saudi sehingga terdapat dampak positif dan negatif yang dihasilkan.

Adapun dampak positifnya pertama berdasarkan *Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2021* dinyatakan bahwa Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNU) yang terletak di Arab Saudi memiliki tingkat kesetaraan gender paling baik sedunia dengan skor sebesar 88,6. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa upaya pengarusutamaan gender dalam pendidikan sudah menunjukkan kemajuan pesat yang mana upaya implementasi pengarusutamaan gender telah berhasil memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dalam mengakses pendidikan dan bidang apapun yang mereka minati. Dengan kebebasan tersebut perempuan juga dapat berkarir sesuai dengan kemampuan dan *passion* mereka tanpa adanya pembatasan seperti dahulu.

Kemudian Arab Saudi juga mengalami kenaikan tingkat kebahagiaan pasca adanya Visi Arab Saudi 2030 yang di dalamnya terdapat upaya pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan berdasarkan *World Happiness Report* tahun 2022 Arab Saudi menempati posisi ke-25 dari 146 negara dibandingkan sebelum diimplementasikan secara massif upaya pengarusutamaan gender yang mana pada tahun 2017 Arab Saudi menduduki posisi ke-37 dari 155 negara. Survey tersebut dinilai berdasarkan berbagai faktor yakni PDB/kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan menentukan pilihan hidup, kedermawanan, dan persepsi terhadap korupsi. Hasil tersebut mengindikasikan perempuan Arab Saudi sudah lebih mendapatkan hak kebebasannya dalam menentukan pilihan hidup. Bahkan angka harapan hidup sehat mereka meningkat dengan diberikannya kebebasan dalam berolahraga dan datang pada tempat kebugaran. Menurut laporan *Hologic Global Women's Health Index* tahun 2021 juga

diketahui bahwa Arab Saudi menjadi negara Arab dengan peringkat teratas untuk kesehatan perempuan. menurut data global Arab Saudi menempati posisi ke-28 bahkan lebih unggul dibandingkan dengan United Kingdom yang menempati posisi ke-30 (*Hologic, 2021*).

Pengarusutamaan gender yang diawali dari Visi Arab Saudi 2030 sedang berjalan menuju arah yang benar dan mampu mengakomodasikan kepentingan semua gender sehingga tujuan utama kesetaraan gender dapat segera tercapai. Namun dalam bidang sosial budaya ini juga banyak mengalami pertentangan dari kelompok yang kontra terhadap upaya pengarusutamaan gender ini namun juga terdapat kelompok pro yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan hal yang tidak pantas. Menurut *UN Women (2023)* intervensi yang terjadi dengan tujuan memajukan kesetaraan gender memang seringkali mengalami reaksi negatif oleh pihak-pihak yang merasa status quonya terancam dan tidak jarang kekerasan mengiringi reaksi tersebut. Namun *UN Women (2023)* juga menjelaskan bahwa adanya reaksi negatif tersebut menunjukkan bahwa adanya dampak positif yang benar-benar terlihat di masyarakat sehingga mereka akhirnya terancam oleh kemajuan tersebut

Adapun dampak negatif dari pengarusutamaan gender di Arab Saudi pada bidang sosial budaya yang pertama terjadi penentangan terhadap reformasi yang terjadi di Arab Saudi yang salah satunya disebabkan oleh kebebasan yang diterima oleh perempuan. Dilansir dari *SindoNews (2023)* bahwa pihak penentang ini setidaknya berasal dari 3 golongan yakni Salafi, Pangeran dari House of Saud, dan juga masyarakat Arab Saudi yang suka dengan hal-hal yang apa adanya dan telah berjalan lama. Penentang reformasi memandang bahwa kebijakan reformasi yang terjadi di Arab Saudi ini sudah salah arah karena merupakan bentuk

dari penodaan terhadap nilai-nilai keislaman. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu hambatan besar bagi pemerintah Arab Saudi untuk melanjutkan upaya pengarusutamaan gender karena dikhawatirkan konflik ini dapat mengancam stabilitas negara salah satunya ditakutkan akan berakhir pada upaya kudeta terhadap pemimpin Arab Saudi saat ini.

Kedua, menurut UN Women (2023) juga kekerasan dapat terjadi sebagai reaksi dari pengarusutamaan gender, hal ini tercermin dari kebebasan yang diberikan pada perempuan di Arab Saudi beberapa tahun belakangan ini rupanya juga memiliki sisi gelap. Kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang dalam melakukan tindak kriminal yakni kekerasan seksual pada perempuan. Perempuan Arab Saudi yang telah dibebaskan berbaur dengan laki-laki sering mendapat tindakan tidak menyenangkan dari laki-laki. Perempuan menjadi objek yang dilecehkan berpartisipasi dalam berbagai macam acara tanpa pemisahan antara laki-laki dan perempuan (Detik, 2021). Tindak kriminal kekerasan seksual tersebut menjadi permasalahan baru yang dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi sebagai dampak negatif dari diimplementasikannya pengarusutamaan gender di negara tersebut, karena kekerasan seksual tidak hanya berpengaruh bagi individu namun juga dapat berdampak pada perusahaan dan lingkungan tempat tinggal korban (Rakhmadani, 2020).

Bidang Politik

Bidang selanjutnya ialah politik. Politik merupakan salah satu bidang yang paling berpengaruh dalam pengarusutamaan gender karena sejatinya pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi politik untuk mencapai kesetaraan gender. Dijelaskan dalam *handbook* UN Women mengenai *Gender Mainstreaming* bahwa kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah juga harus memastikan bahwa pengarusutamaan gender mampu membawa perubahan pada hubungan laki-laki dan perempuan sehingga kesenjangan gender yang terjadi dapat perlahan dihapuskan. Dengan diimplementasikan pengarusutamaan gender pada bidang politik ini maka perempuan di Arab Saudi akhirnya dapat berpartisipasi menjadi bagian dari pemerintahan. Kebijakan sendiri merupakan titik acuan dari pelaksanaan pengarusutamaan gender (CEC, 1996). Maka penting agar perempuan dapat berpartisipasi bersama-sama dengan laki-laki membentuk suatu kebijakan yang dapat mewakili perspektif laki-laki maupun perempuan.

Sama halnya seperti bidang lainnya, pengarusutamaan gender di bidang politik juga mengharapkan kesetaraan gender menjadi hasil akhir yang ingin dicapai (UN Women, 2023). Dampak positif yang dicapai akan berpotensi semakin besar untuk diraih apabila kehadiran perempuan sebagai pembuat kebijakan semakin besar dan diperhitungkan pula. Pada bidang ini telah diidentifikasi bahwa memberikan dampak positif dan juga negatif karena pengarusutamaan gender dalam bidang politik masih menghadapi hambatan atas reaksi pihak-pihak yang merasa terancam.

Adapun dampak positifnya pasca Visi Arab Saudi 2030 perempuan di negara tersebut sudah banyak yang menduduki kursi pemerintahan. Dengan demikian pembuat kebijakan dapat mendengar keluh kesah yang dialami oleh sesama perempuan. contohnya ialah saat diluncurkan kebijakan yang memperbolehkan perempuan mengemudi. Kebijakan tersebut ternyata direkomendasikan oleh perempuan-perempuan yang berada di Dewan Syura atas dasar kesulitan-kesulitan yang dialami perempuan di Arab Saudi pada masa itu.

Pada 2020 juga terjadi penunjukan 13 perempuan sebagai anggota *Saudi Human Rights Commission* (HRC) juga membawa dampak baik. Diketahui bahwa anggota Saudi HRC beranggotakan 26 orang yang mana komposisi gender di komisi tersebut sudah seimbang. Bahkan Ketua terbaru dari Saudi HRC adalah perempuan yakni Hala binti Mazyad Al-Tuwaijri (Arab News, 2022). Komisi Human Rights Commission (HRC) ini memiliki peran penting di Arab Saudi yakni mempromosikan Hak Asasi Manusia berdasarkan standar Hak Asasi Manusia secara internasional. Dengan kehadiran perempuan di komisi tersebut maka suara perempuan terkait hak-hak kemanusiaannya lebih terwakilkan. Dan dengan demikian pula kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan perlahan menuju hasil yang ideal seperti yang diharapkan.

Arab Saudi juga menjadikan ini sebagai upaya pengarusutamaan gender untuk melakukan *rebranding* dari citranya yang dulu buruk dan tidak ramah bagi perempuan. Melalui serangkaian kebijakan yang diluncurkan oleh Arab Saudi menjadi gebrakan baru yang menarik perhatian dunia, sekaligus menjadi bukti bahwa Arab Saudi telah serius menjalankan dan berupaya merealisasikan komitmennya terhadap CEDAW yang telah diratifikasi pada tahun 2000 lalu. Hal ini juga menjadi strategi politik Arab Saudi untuk diterima dalam pergaulan internasional demi meraih kepentingan negaranya. Hasil yang paling menentukan kemajuan Arab Saudi ialah hasil menurut Global Gender Gap 2022 Arab Saudi menempati posisi 127 dari 146 negara. Hasil tersebut sudah mengalami kemajuan dibandingkan pada tahun 2016 Arab Saudi menempati posisi 141 dari 144 negara. Tidak hanya kesetaraan gender di negaranya yang mampu diraih namun juga *trust* dunia internasional mulai terbangun.

Salah satu dampak positif dari *trust* tersebut ialah Arab Saudi dipercaya oleh PBB menjadi anggota dari Women Rights Commission, Masa jabatan tersebut mulai berlaku pada bulan Maret 2023 meski sudah diumumkan sejak tahun 2022, Komisi ini menekuni hal-hal yang terkait dengan HAM yang dimiliki oleh perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Arab Saudi sudah berhasil membawa perubahan besar pada hubungan antar gender sehingga kini telah dipercaya pula oleh PBB untuk berpartisipasi mempromosikan kesetaraan gender bahkan dalam skala global.

Namun dengan adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dan negara itu sendiri, terdapat pula reaksi negatif yang menjadi hambatan untuk menyebarkan norma kesetaraan gender secara menyeluruh (UN Women, 2023). Pihak yang kontra dengan pengarusutamaan gender ini beralasan bahwa modernitas yang dibentuk oleh Pangeran Mahkota Muhammad Bin Salman telah merusak bangsa dan menodai ajaran agama Islam yang mana bila terus dilanggengkan akan menjadi tanda-tanda akhir zaman.

Apabila posisi pihak oposisi semakin kuat maka dapat menjadi ancaman besar karena mempengaruhi stabilitas politik negara terlebih lagi negara tersebut masih berbentuk monarki yang rawan akan kudeta. Hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi pihak-pihak penentang. Tidak mudah untuk mengatasi permasalahan ini karena negara Arab Saudi memang memiliki sejarah panjang akan budaya patriarki yang kental. Reaksi negatif yang terjadi cenderung akan memburuk dan berakhir pada kekerasan. Oleh karena itu perlu evaluasi dan monitoring lebih lanjut dalam modernisasi negara Arab Saudi agar dapat tetap menjamin kebebasan perempuan dan juga mencapai kesetaraan gender (UN Women, 2023).

PENUTUP

Visi Arab Saudi 2030 menjadi suatu acuan yang melahirkan serangkaian kebijakan yang mulai mengarusutamakan gender dan membawa norma kesetaraan gender pada masyarakat Arab Saudi sehingga berdampak pada berbagai macam bidang. Implementasi pengarusutamaan gender menjadi penting untuk digunakan dalam menilai dampak yang ditimbulkan dari serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender karena pada dasarnya titik acuan dari pengarusutamaan gender terletak pada kebijakannya yang responsif gender.

Melalui implementasi pengarusutamaan gender di Arab Saudi memberikan hasil yang beragam. Pada bidang ekonomi mampu memberikan dampak positif yang besar yang ditandai dengan peningkatan pemberdayaan perempuan, kenaikan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja, dan peningkatan PDB.

Pada bidang sosial budaya terdapat dampak yang positif dan negatif. Dampak positif dari pengarusutamaan gender di Arab Saudi ialah menurut survei Times Higher Education Impact Rankings, Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNU) yang terletak di Arab Saudi memiliki tingkat kesetaraan gender paling baik sedunia. Selain itu terjadi peningkatan angka kebahagiaan warga Arab Saudi. Serta laporan-laporan lainnya yang menunjukkan bahwa Arab Saudi sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan seperti kesehatan terhadap perempuan dan lainnya. Namun terdapat pula dampak negatif dalam bidang sosial budaya yakni terbentuknya oposisi yang mengancam stabilitas negara dan juga terjadinya kekerasan seksual.

Dalam bidang politik juga terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah perempuan dapat lebih banyak lagi berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga

kebijakan yang dibuat dapat lebih mewakili perpektif perempuan. Lalu juga terdapat penunjukan perempuan Saudi Human Rights yang juga diketuai oleh perempuan memudahkan jalan perempuan untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia. Dampak positif lainnya yang dirasakan oleh negara yakni *rebranding* citra Arab Saudi yang sebelumnya buruk terkait kesetaraan gender sehingga hasilnya menjadi lebih baik bahkan Arab Saudi ditunjuk menjadi anggota UN Women Rights Commission. Dampak buruknya ialah terjadi pertentangan dari pihak yang tidak suka modernitas. Hal tersebut tentunya akan ditakutkan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik di Arab Saudi.

Dampak negatif yang terjadi memerlukan evaluasi dan monitoring lebih lanjut oleh pemerintah Arab Saudi untuk menangani hambatan dan tantangannya. Diharapkan pada pada penelitian selanjutnya penulis lain dapat lebih mengeksplor lagi fenomena pengarusutamaan gender di negara yang konservatif salah satunya Arab Saudi. Seperti misal fenomena kekerasan seksual yang kini marak terjadi di Arab Saudi dan lain-lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Andreasson, S. (2014). Conservatism. In *Political Ideologies* (pp. 47-70). Routledge.
- Finnemore, M., & Kathryn Sikkink. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917. Diakses dari www.jstor.org/stable/2601361
- Hannan, C. (2022). Handbook on gender mainstreaming for gender equality results.
- Jaggar, A. M. (1983). *Feminist politics and human nature*. Rowman & Littlefield.

Jurnal dan Thesis

- Abdullah, N., & Hastira, M. F. (2023). Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(01), 68-87.
- Ananta, A., Fasisaka, I., & Parameswari, A. (2015). Kampanye Women and Children First pada Bidang Pendidikan di Tiongkok oleh United Nations of Children's Fund (UNICEF). *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(03).
- Campbell, J., Fitzgerald, R., & McSorley, L. (2009). Structural Funds and gender equality: the impact of gender mainstreaming in Western Scotland. *Local Economy*, 24(2), 140-150.
- Caglar, G. (2013). Gender mainstreaming. *Politics & Gender*, 9(3), 336-344
- Moser, C., & Moser, A. (2005). Gender mainstreaming since Beijing: a review of success and limitations in international institutions. *Gender & Development*, 13(2), 11-22.
- Daly, M. (2005). Gender mainstreaming in theory and practice. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 12(3), 433-450.
- Dewi, K., Wiranata, I., & Nugraha, A. (2022). Hambatan dalam Proses Internalisasi Norma Global Kesetaraan Gender Pasca Ratifikasi CEDAW di Ghana. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 2(1), 177-191.
- Dewi, N. R., Fikri, A. I., & Febriani, A. (2020). Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 30-42.
- Dewi, O. (2021). Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di Filipina tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 200-218.
- Eriyanti, L. D. (2018). Gender Mainstreaming Dalam Peacekeeping Operation PBB di Timor Leste (UNTAET, UNMISSET, dan UNOTIL). *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 5(3).
- Fajar, N., & Rasyidah, R. (2021). Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan di Arab Sauda Era Raja Salman. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10(1), 47-58.
- Hardiyanti, M., & Yuniati, S. (2021). Penjaminan Hak-Hak Perempuan Dalam Visi Saudi Arabia 2030. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(1), 1-11.
- Rakhmadhani, H., Sushanti, S., & Nugraha, A. (2020). Upaya Gerakan Me Too Mengurangi Kekerasan Seksual pada Perempuan di India Tahun 2018. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, 1(1).
- Mufiedah, A. I., Harini, S., & Haqqi, H. (2020). Reformasi Hal-Hak Perempuan Arab Saudi Melalui Saudi Vision 2030 Tahun 2017-2019. *Solidaritas*, 4(3). Reformasi Hal-Hak Perempuan Arab Saudi Melalui Saudi Vision 2030 Tahun 2017-2019.
- Mujihastuti, N. A. (2019). Analisis Perubahan Kebijakan Arab Saudi Tentang Peran Perempuan Di Ranah Publik: Studi Kasus Royal Decree No. M/85 Tahun

- 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Nasrullah, I. D. (2021). Pengarusutamaan Gender di Jepang Untuk Mencapai SDG's (Sustainable Development Goals) dalam Perspektif Feminisme Liberal. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(2), 132-147.
- Nur Fauziah, E. (2017). Peran United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (UN Women) Melalui Penerapan Cedaw Dalam Menegakan Hak Asasi Perempuan Di Arab Saudi (2014-2017) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Shash, F. G., & Forden, C. L. (2016, May). Gender equality in a time of change: Gender mainstreaming after Egypt's Arab Spring. In *Women's Studies International Forum* (Vol. 56, pp. 74-82). Pergamon.
- Topal, A. (2019, September). Economic reforms and women's empowerment in Saudi Arabia. In *Women's Studies International Forum* (Vol. 76, p. 102253). Pergamon.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati permasalahan gender dan pengarusutamaan gender (pug). *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 1(1), 29-42
- Wiranata, I. M. A. (2021). The Dynamics of International Norms Diffusion: The Study of Women Activists in Bali. *Global Strategis*, 15(2), 353-374.
- Artikel**
- Amnesty. (2022). *Saudi Arabia Codifies Male Guardianship and Gender Discrimination*. Diakses pada Februari 2023 melalui <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2022/12/saudi-arabia-codifies-male-guardianship-and-gender-discrimination/>
- Arab News (2020). *13 Women Appointed to Saudi Human Rights Commission*. Arab News. Diakses pada 24 Juli 2023 melalui <https://www.arabnews.com/node/1699486/saudi-arabia>
- Arab News (2022). *Saud Arabia Ranks 25th in UN World Happiness Report*. Arab News. Diakses pada 24 Juli 2023 melalui <https://www.arabnews.com/node/2045881/saudi-arabia>
- BBC. (2019). *Mengapa Perempuan di Arab Saudi Bisa Dipenjara Kalau Tidak Mematuhi Perintah Ayah?*. BBC News. Diakses pada 9 Februari 2023 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46791977>
- BBC. (2018). *Saudi Arabia Allows Women to Join Military*. BBC. Diakses pada 1 Juli 2023 melalui <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43197048>
- Detik. (2021). *Arab Saudi Izinkan Konser Musik Penonton Pria dan Wanita Boleh Berbaur*. Diakses pada 22 Juli 2023 melalui [Arab Saudi Izinkan Konser Musik Pria dan Wanita Boleh Berbaur](https://www.detik.com/indonesia/saudi-arabia/detik-43197048)
- Equiom. *the Shifting Tides Towards Women's Empowerment in Saudi Arabia*. Equiom. Diakses pada Februari 2023 melalui <https://www.equiomgroup.com/news/shifting-tides-towards-womens-empowerment-saudi-arabia>
- Faisal, M. (2018). *Sistem Perwalian: Biang Kerok Penindasan Perempuan Saudi*. TirtoID. Diakses pada 9 Februari 2023 melalui <https://tirto.id/sistem-perwalian-biang-kerok-penindasan-perempuan-saudi-cFun>
- Ho, M. (2019). *Saudi Arabia: The Changing Role of Women*. HKTDC. Diakses pada 16 Desember 2022 melalui [Saudi Arabia: The Changing Role of Women | HKTDC Research](https://www.hktdc.com/research/saudi-arabia-the-changing-role-of-women)

- HRW. (2013). *Saudi Arabia: End Driving Ban for Women*. Human Rights Watch. Diakses pada 16 Februari 2023 melalui [Saudi Arabia End Driving Ban Women](#)
- Muhaimin. (2022). *Mereka yang Marah dengan Reformasi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman*. SindoNews. Diakses pada 22 Juli 2023 melalui [Mereka yang Marah dengan Reformasi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman \(sindonews.com\)](#)
- Rahman, M. (2021). *Gerakan Reformasi Kaum Perempuan di Dunia Arab*. Kompas. Diakses pada 18 Juli 2023 melalui [Reformasi Perempuan Arab](#)
- Tim Redaksi. (2023). *Langkah Maju Perempuan Arab*. Kompas Diakses pada 3 Juli 2023 melalui [Langkah Maju Perempuan Arab](#)
- Qurtuby, S. (2023). *Reformasi Saudi*, Kompas, Diakses pada 1 Juli 2023 melalui [Reformasi Saudi](#)
- Laporan dan Publikasi**
- Commission of the European Communities. (1996) *Communication from the Commission: Incorporating Equal Opportunities for Women and Men into all Community Policies and Activities COM (96) 67 final of 21 February 1996* (Brussels Commission of the European Communities)
- Hologic. (2021). *The Hologic Global Women's Health Index*. Hologic. Diakses pada 24 Juli 2023 melalui https://hologic.womenshealthindex.com/sites/default/files/2022-09/Hologic_2021-Global-Women's-Health-Index_Full-Report.pdf
- Lidwina Andrea. *Universitas Perempuan di Arab Saudi Punya Kesetaraan Gender Terbaik*. KataData. Diakses pada 20 Juli 2023 melalui [Universitas Perempuan di Arab](#)
- [Saudi Memiliki Kesetaraan Gender Terbaik](#)
- Macrotrends. (2023). *Crude Oil Prices 70 Year Historical Chart*. Macrotrends. Diakses pada 16 Februari 2023 melalui <https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart>
- Saudi Arabia Government. *Saudi Arabia Vision 2030*. Gov SA. Diakses pada 20 November 2020 melalui www.vision2030.gov.sa
- Saudi Arabia Government. *Women Empowerment in the Kingdom of Saudi Arabia*. My Gov SA. Diakses pada 25 November 2022 melalui [Women Empowerment in the Kingdom of Saudi Arabia](#)
- UN Watch. (2022). *U.N. Elects Saudi Arabia to Women's Rights Commission*. UN Watch. Diakses pada 24 Juli 2023 melalui [Elects Saudi Arabia to Women Rights](#).
- WBL. *Women Business and The Law 2016 Report*. World Bank. Diakses pada 24 Juli 2023 melalui <https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2021/snapshots/Saudi-arabia.pdf>
- WBL. *Women Business and The Law 2022 Report*. World Bank. Diakses pada 24 Juli 2023 melalui <https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2021/snapshots/Saudi-arabia.pdf>
- WEF. (2022). *Global Gender Gap Report 2022*. World Economic Forum. Diakses pada 16 Desember 2022 melalui [Global Gender Gap Report 2022](#)
- World Happiness Report. (2017). *World Happiness Report 2017*. WL. Diakses pada 25 Juli 2023 melalui <https://worldhappiness.report>

World Happiness Report. (2022). *World Happiness Report 2022*. WL. Diakses pada 25 Juli 2023 melalui <https://worldhappiness.report>